

**Implementasi Kebijakan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah
Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan
Menengah di SMA Negeri 1 Kudus**

Oleh :

Hesti Annisa, Hartuti Purnaweni, Dewi Rostyaningsih

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

SMA 1 Kudus was RSBI (Pre International Standardized School) since 2007. One of the school requirements of RSBI to become SBI (International Standardized School) is the fulfillment of pre requirement standard stated in the Permendiknas No.78/2009. This study attempted to answer the implementation of Permendiknas No.78/2009 on International Standardized School in Elementary and Secondary Education, at SMA 1 Kudus. This research focused on the implementation of nine standards of quality education stipulated in the regulation, at SMA 1 Kudus, as an effort of this school to reach SBI status.

This research used qualitative research method, to describe phenomenon that affect the implementation of Permendiknas No.78/2009 based on nine standards of quality education, namely: Accreditation, Curriculum, Learning Process, Value, Educator, Staff of Education, Infrastructure, Management, and Cost. From the result of research, it is known that the implementation that have been well done based on the nine standards of quality education are: Curriculum, Value, Staff of Education, Infrastructure, Management, and Cost. However, Accreditation, Learning Process, and Educator have not been well implemented, because lack of human and financial resources.

Recommendations from the results of this research in order to improve the implementation of Permendiknas No.78/2009 is that SMA 1 Kudus should encourage its teachers to get their graduate education, and to make cooperation with local government for fund allocation for the betterment of SMA 1 Kudus.

Key words : Policy Implementation, RSBI, Standard of Quality Education.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketertinggalan pendidikan di Indonesia dibandingkan negara-negara lain merupakan hal yang membuat wakil pemerintah Indonesia tidak bisa berdiri tegak di forum-forum internasional. Maka dari itu, harus ada upaya mengharumkan nama bangsa melalui pendidikan. Secara garis besar permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini dapat dikelompokkan menjadi tiga:

1. Pemerataan pendidikan dan perluasan akses pendidikan
2. Peningkatan pendidikan dalam hal mutu, relevansi, dan daya saing
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik terhadap pendidikan

Khusus terkait dengan keharusan setiap negara untuk berkompetisi secara global, pemerintah Indonesia juga sudah berupaya mengantisipasi dengan berbagai cara. Salah satunya lewat dunia pendidikan dengan menyelenggarakan program pendidikan yang memenuhi standar internasional, baik pada level sekolah dasar maupun sekolah menengah.

Di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 50 Ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dicantumkan agar setiap daerah sekurang-kurangnya mempunyai satu rintisan sekolah yang bertaraf internasional. Kecenderungan yang ada dewasa ini adalah Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) tersebut merupakan sekolah-sekolah plus yang di dalam kurikulumnya pada mata pelajaran tertentu bahasa pengantar

menggunakan bahasa Inggris, serta dilengkapi fasilitas pembelajaran dengan teknologi modern. (Tilaar, 2009: 20)

Amanat Konstitusi di Indonesia tentang hakikat dan tujuan pendidikan antara lain:

1. Pembukaan UUD 1945
2. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP (Standar Nasional Pendidikan)
4. Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang SPMP (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan (2009-2014), strategi kedua dan strategi ketiga di dalamnya, disebutkan bahwa :

1. Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI,
2. Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI,
3. Sekurang-kurangnya 85% kota memiliki 2 SMP SBI atau RSBI,
4. Sekurang-kurangnya 70% kabupaten/kota memiliki SMA/ SMLB dan SMK SBI atau RSBI.

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap kabupaten atau kota dituntut pemerintah untuk memiliki sekolah-sekolah bertaraf internasional. Adanya kebijakan yang mengatur Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) merupakan kebijakan kelanjutan dari kebijakan Sekolah Standar Nasional (SSN).

Secara garis besar tidak ada perbedaan yang signifikan atas dua kebijakan tersebut. Dapat dikatakan bahwa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah kebijakan yang masih bersifat belajar, dan kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) ini merupakan sebuah kebijakan lebih matang dari SSN yang kurikulum barunya dalam melaksanakan pendidikan terdapat standar proses yang diperkaya dengan model proses pembelajaran di Negara anggota OECD atau negara maju lainnya. OECD adalah *Organization for Economic Co-Operation Development*, merupakan organisasi internasional yang tujuannya membantu pemerintah negara anggotanya untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi.

Atas pertimbangan hal-hal di atas, Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia secara resmi menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut, sejumlah sekolah di Indonesia sudah menerapkannya dengan adopsi dan adaptasi sesuai dengan peraturan.

Kabupaten Kudus terletak di Jawa Tengah bagian utara. Pada tahun 2007, kabupaten ini memperoleh kepercayaan untuk melaksanakan implementasi kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Satu sekolah yang menyandang pada

tingkatan sekolah menengah adalah di Sekolah Menengah Pertama (SMA) Negeri 1 Kudus.

Dalam Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 dijelaskan tentang implementasi penyelenggaraan RSBI sampai pada ke SBI. Hal ini harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu terpenuhinya sembilan standar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang terdapat pada Bab II Permendiknas mengenai Standar Penyelenggaraan pasal 3 sampai pasal 15. Dari penjelasan tersebut, penulis berniat untuk menganalisis proses implementasi penyelenggaraan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berdasarkan penerapan sembilan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada sekolah-sekolah bertaraf internasional dalam Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 di SMA Negeri 1 Kudus.

B. TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berdasarkan penerapan sembilan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada sekolah bertaraf internasional dalam Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 di SMA Negeri 1 Kudus.

C. TEORI

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% dan 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini

masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi (Nugroho, 2006: 119).

George Edwards III (1980:1) dikutip dalam Nugroho (2006: 140) mengemukakan bahwa dalam mengimplementasi suatu kebijakan disarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dan terlaksana dengan efektif, antara lain:

a. Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, serta bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

b. *Resourcess* (Sumber-sumber)

Berkenaan pada ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk menyelenggarakan kebijakan secara efektif.

c. *Dispotition* (Sikap dan tanggap)

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelenggarakan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Dalam struktur birokrasi, yang menjadi tantangan

adalah bagaimana agar tidak terjadi perpecahan birokrasi karena struktur ini menjadikan proses implemetasi menjadi jauh dari efektif.

Penulis menggunakan teori model implementasi kebijakan dari George Edward III. Teori ini mementingkan empat hal yang harus diperhatikan dalam mengimplementasi suatu kebijakan agar dapat berjalan secara efektif, antara lain : komunikasi, sumber daya pendukung, disposisi atau sikap tanggap implementor, dan struktur birokrasi.

D. METODE

Sugiyono (2005:1) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif bersifat deskriptif.

Data yang diperoleh meliputi transkrip *interview* (wawancara), catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain (Danim, 2002:51). Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* dimana ditentukan satu orang untuk dijadikan informan utama yaitu Kepala Sekolah SMA 1 Kudus (Bapak Suad), kemudian informan tersebut menunjuk orang lain untuk dijadikan informan. Analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan data.

Lokasi penelitian ini adalah di SMA Negeri 1 Kudus. Hal ini dengan alasan bahwa, pada SMA Negeri 1 Kudus telah menyandang predikat RSBI sejak tahun 2007.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (8 standar pendidikan), dilaksanakannya sembilan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju lainnya di dunia.

Sekolah-sekolah yang mendapat sandangan atau predikat dari pemerintah, harus melalui proses perjalanan yang cukup tegas dan bertahap. Dalam prospek menuju Sekolah Bertaraf Internasional, sekolah-sekolah yang menyandang predikat RSBI harus memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari 9 standar penjaminan mutu, antara lain:

1. Akreditasi
2. Kurikulum
3. Proses Pembelajaran
4. Penilaian
5. Pendidik
6. Tenaga Pendidik
7. Sarana dan Prasarana
8. Pengelolaan
9. Pembiayaan

Dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 indikator kunci minimal sekolah bertaraf internasional adalah terakreditasi minimal A, yaitu mendapatkan nilai lebih besar sama dengan 95 (≥ 95) dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Berdasarkan

penelitian, SMA 1 Kudus telah mendapatkan akreditasi resmi yang diperoleh dengan adanya perimaan akreditasi A dengan skor 97 pada tahun 2011. Kemudian untuk akreditasi tambahan dari badan akreditasi sekolah pada salah satu negara anggota OECD atau negara maju lainnya yang memiliki keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, SMA 1 Kudus belum melaksanakannya karena kendala jarak tempat dan pembiayaan.

Objek penjaminan kurikulum, dalam Permendiknas No. 78 Tahun 2009, antara lain: menerapkan KTSP (Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan), menerapkan sistem SKS (Sistem Kredit Semester), memenuhi standar isi mata pelajaran, dan memenuhi SKL (Standar Kompetensi Lulusan). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui kegiatan wawancara dan mengkaji dokumen-dokumen terkait, sekolah ini telah melaksanakan empat indikator kunci minimal dalam objek penjaminan kurikulum.

Proses pembelajaran pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menggunakan metode penyampaian mata pelajaran dengan menggunakan *bilingual* atau dua bahasa pada mata pelajaran tertentu, yaitu matematika, IPA, dan IPS. Selain menggunakan dua bahasa dalam bahasa pengantar pada beberapa mata pelajaran, SMA 1 Kudus juga menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada semua mata pelajaran yang diberikan. Proses pembelajaran seperti ini yang diharapkan pada Permendiknas No. 78 Tahun 2009.

Dalam objek penjaminan penilaian sekolah, SMA 1 Kudus mengacu pada standar penilaian yang harus dipenuhi sekolah-sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), antara lain: menerapkan model penilaian otentik dan mengembangkan model penilaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi, peserta didik wajib mengikuti ujian nasional, melaksanakan ujian sekolah yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan, dan dapat melaksanakan ujian sekolah dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.

Standar pendidik yang diharapkan sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan antara lain semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK, guru mata pelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan mampu mengampu pembelajaran berbahasa Inggris, dan minimal 30% guru berpendidikan S2/S3 dari Perguruan Tinggi yang program studinya berakreditasi A. Permasalahan ditemukan pada syarat terakhir, yaitu SMA 1 Kudus belum 30% pengajar lulusan S2, karena baru 23% pengajar yang lulusan S2.

Kepala Sekolah sebagai pemimpin dalam organisasi ini dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajarnya sebagai tenaga kependidikan juga dibantu dan didukung oleh : guru, tenaga tata usaha, administrasi, perpustakaan, teknisi, laboran, penjaga sekolah, tenaga keamanan dan lain sebagainya. Seluruh tenaga kependidikan sekolah dipimpin oleh Kepala Sekolah di SMA 1 Kudus

telah mampu merencanakan dan mengimplementasikan beberapa program sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Permendiknas No. 78 Tahun 2009 dalam rangka mencapai predikat SBI.

Untuk objek penjaminan mutu sarana dan prasarana, SMA 1 Kudus telah melengkapi setiap ruang kelas dengan sarana pembelajaran berbasis TIK, perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia serta SMA 1 Kudus telah dilengkapi dengan ruang multi media, ruang unjuk seni budaya, fasilitas olah raga, klinik, dan lain sebagainya. Objek penjaminan mutu pengelolaan dalam Permendiknas dan yang diimplementasikan di SMA 1 Kudus antara lain:

- a. Meraih sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000.
- b. Merupakan sekolah/madrasah multikultural.
- c. Menjalin hubungan “*sister school*” dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri.
- d. Sekolah bebas narkoba dan rokok.
- e. Sekolah bebas kekerasan (*bullying*).
- f. Menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam segala aspek pengelolaan sekolah.
- g. Meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetisi sains, matematika, teknologi, seni, dan olah raga.

Objek penjaminan pembiayaan di SMA 1 Kudus selain diurus oleh Bendahara sekolah juga mendapatkan perhatian dari pihak Komite Sekolah.

Dalam memenuhi standar pembiayaan Permendiknas antara lain dengan menerapkan subsidi silang untuk 20% siswa kurang mampu, dan hal ini telah dilaksanakan di SMA 1 Kudus.

B. ANALISIS

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. George Edwards III (1980:1) mengemukakan bahwa dalam mengimplementasi suatu kebijakan disarankan untuk memperhatikan empat isu pokok antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur brokrasi agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dan terlaksana dengan efektif.

SMA 1 Kudus telah menyelenggarakan implementasi RSBI lebih dari lima tahun mulai dari Juli 2007 sampai dengan Desember 2012 berdasarkan Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain tanggung jawab terhadap undang-undang tersebut, implementasi kebijakan penyelenggaraan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) yang dilaksanakan di SMA 1 Kudus juga diatarbelakangi oleh visi SMA 1 Kudus agar mampu bersaing secara global dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sekolah bertaraf internasional. Dalam melaksanakan tugas sebagai sekolah berstatus RSBI, SMA 1 Kudus telah menjalankan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Harapan selanjutnya setelah menyandang RSBI adalah menyandang SBI (Sekolah Bertaraf

Internasional). Dalam perjalanan inilah SMA 1 Kudus mengacu pada penilaian 9 Sistem Mutu Penjaminan Pendidikan (SPMP) yang ada pada Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Analisis hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang dilaksanakan SMA Negeri 1 Kudus, dengan mengacu pada sembilan sistem mutu penjaminan sekolah telah dilaksanakan penulis sebelum adanya berita pembubaran RSBI oleh MK.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, untuk penjaminan mutu akreditasi, yang belum dilaksanakan SMA 1 Kudus adalah belum memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan salah satu sekolah di negara maju lainnya. Apabila dilihat dari teori Edwards III pada objek penjaminan mutu akreditasi ini yang kurang adalah pada sumber daya finansial karena untuk melakukan perjanjian akreditasi membutuhkan banyak dana dalam administrasinya dan biaya perjalanan yang dilaksanakan.

Pada penjaminan mutu kurikulum adalah SMA 1 Kudus telah melaksanakan empat poin yang harus dilaksanakan oleh sekolah berstatus RSBI. Kekuatan pelaksanaan RSBI apabila dilihat dari teori Edwards III,

berada pada struktur birokrasi karena memiliki SOP yang jelas. Untuk standar proses pembelajaran, belum berjalan maksimal karena ada kelemahan dalam sumber daya finansial, yaitu kurangnya dana dalam mengadakan kerjasama dengan sekolah lain yang ada di negara maju lainnya. Penjaminan mutu penilaian, kekuatan pada disposisi, karena implementor RSBI saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan RSBI.

Untuk penjaminan mutu pendidik, belum dilaksanakan dengan maksimal karena ada kelemahan dalam sumber daya manusia, yaitu jumlah guru lulusan S2 belum 30% sesuai dengan aturan dalam Permendiknas No. 78 Tahun 2009. Untuk tenaga kependidikan sudah diimplementasikan sesuai dengan Permendiknas No. 78 Tahun 2009 dengan baik dengan kekuatan berada pada komunikasi yang tepat dalam pendelegasian kewenangan dan tugas.

Untuk sarana prasarana dan pembiayaan, SMA 1 Kudus mengimplementasikan sesuai dengan Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 berjalan sempurna karena adanya dukungan sumber daya finansial dimana orang tua siswa yang mau mendukung biaya, berasal dari kalangan menengah ke atas. Untuk penjaminan pengelolaan, berjalan dengan baik dengan dukungan faktor komunikasi yang membuat sistem pengelolaan sekolah yang tepat, efektif dan efisien dari seluruh struktur sekolah.

PENUTUP

A. SIMPULAN

SMA 1 Kudus merupakan sekolah yang berstatus RSBI sejak tahun 2007. Keinginan sekolah yang berstatus RSBI menjadi sekolah SBI harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan dalam Permendiknas No. 78 Tahun 2009. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di SMA 1 Kudus. Dalam penelitian ini akan dibahas apa saja yang telah dilaksanakan sekolah untuk meraih status SBI dengan pelaksanaan Sembilan standar penjaminan mutu pendidikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk menjelaskan fenomena apa saja yang terjadi dalam implementasi kebijakan Permendiknas No. 78 Tahun 2009 dengan melihat pelaksanaan sembilan standar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), yaitu: Akreditasi, Kurikulum, Proses Pembelajaran, Penilaian, Pendidik, Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana Pengelolaan, dan Pembiayaan. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standar SPMP adalah: Kurikulum, Penilaian, Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana Pengelolaan, dan Pembiayaan. Untuk Akreditasi, Proses Pembelajaran, dan Pendidik, belum terlaksana dengan sempurna karena ada kekurangan sumber daya manusia dan finansial.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah untuk meningkatkan implementasi kebijakan Permendiknas No. 78 Tahun 2009, SMA 1 Kudus bisa mengadakan kerjasama dengan universitas yang menyelenggarakan program S2 dengan lebih cepat sehingga guru-guru yang mengajar di SMA 1 Kudus dapat bertambah jumlah pendidik lulusan S2. Dan kerjasama dengan Pemda untuk mengajukan dana bantuan agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Iif Khoiru. *Strategi Pembelajaran : Sekolah Bertaraf Internasional dan Nasional*. 2010. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2009. Jakarta : Gaung Persada Pers.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. 2006. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. 2009. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. 2006. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tilaar. *Kekuasaan dan Pendidikan*. 2009. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. 2008. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. 2005. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah